

**PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
MELALUI PENERAPAN RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH (RPS)
PADA SMP NEGERI DI KOTA BANDA ACEH**

ORASI ILMIAH DALAM RANGKA
PENGUKUHAN WIDYAISWARA UTAMA

OLEH
DRS. H. TEUKU HASANUDDIN YUSUF, M.Si.
NIP 130686579

Dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2009
di Kampus LPMP NAD

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
2009**

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur ke hadirat Allah SWT yang tidak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karunia, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Selawat dan salam kepangkuan nabi besar Muhammad SWT yang telah membawa risalah sebagai pedoman untuk terwujudnya tujuan hidup manusia berbahagia baik di dunia maupun di yaumul mahsyar nantinya.

Orasi ilmiah ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi persyaratan dan pengukuhan Jabatan Fungsional Widyaiswara, menjadi Jabatan Fungsional Widyaiswara Utama.

Penelitian ini berjudul "**Penjaminan Mutu Pendidikan Melalui Penerapan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) Pada SMP Negeri di Kota Banda Aceh.**

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini belumlah sempurna sebagaimana diharapkan oleh semua pihak, namun penulis berharap kiranya karya tulis ini ada manfaatnya dalam upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan khususnya pada SMP Negeri di Kota Banda Aceh.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan terhadap karya ini, penulis menyampaikan terima kasih, semoga memperoleh balasan yang layak disisi-Nya.

Amin.

**PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
MELALUI PENERAPAN RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH PADA SMP NEGERI
DI KOTA BANDA ACEH
Oleh: Teuku Hasanuddin**

**Bismillahirrahmanirrahim
Asalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Innalhamdalillah Wassalatu Wasalamu Ala Rasulillah.**

Penghormatan saya kepada:

1. Bapak Kepala Direktorat Pembinaan Widyaiswara Lembaga Administrasi Negara Jakarta
2. Bapak Kepala LPMP Nanggroe Aceh Darusalam
3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Prov NAD
4. Bapak Kepala BKPP Prov. NAD
5. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh
6. Bapak Tim Pakar dan Pembahas
7. Bapak dan Ibu Widyaiswara LPMP NAD
8. Bapak dan Ibu Wid. dari BKPP, Kesehatan, BKKBN NAD
9. Bapak Ibu Kelapa SMP Negeri se-Kota Banda Aceh
10. Para Undangan, hadirin sekalian yang saya muliakan

Mengawali orasi Ilmiah ini, perkenankanlah saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji beserta syukur ke hadirat Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat bertemu dalam acara orasi ini. Selawat beserta salam kita sanjungkan keharibaan nabi besar Muhammad SAW pembawa risalah dinulhaq sebagai rahmatan lilalamin.

Penyampaian orasi ilmiah ini merupakan salah satu persyaratan dalam rangka pengukuhan jabatan fungsional widyaiswara utama di LPMP NAD

Hadirin yang saya muliakan,

Penjaminan mutu (quality assurance) di sektor pendidikan dapat diartikan dengan serangkaian proses dan sistem yang terkait untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data tentang kinerja, mutu pendidik dan tenaga kependidikan, program dan lembaga. Proses penjaminan mutu mengidentifikasi aspek pencapaian dan prioritas peningkatan, penyediaan data sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan serta membantu membangun budaya peningkatan mutu berkelanjutan.

Penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan harus dikaji berdasarkan delapan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)

Berbagai upaya serius dilaksanakan oleh pemerintah untuk penjaminan mutu pendidikan di negeri tercinta ini. Salah satu melalui penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS). Secara tegas dalam UU Nomor 20 tahun 2003 menyatakan "pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah". Di samping itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan secara otonomi dan bertanggung jawab.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat diartikan sebagai model manajemen yang melimpahkan otonomi yang lebih besar kepada satuan pendidikan, memberikan fleksibilitas kepada kepala sekolah dan mendorong partisipasi warga sekolah (guru, siswa, tenaga kependidikan, dan masyarakat seperti: komite, ilmuan, DUDI, tokoh masyarakat, untuk penjaminan dan peningkatan mutu satuan pendidikan berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta kanun yang berlaku.

Otonomi tersebut memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan untuk dapat mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan, kebermaknaan sekolah serta tuntutan stakeholdersnya.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bertujuan pula untuk penjaminan mutu pendidikan melalui kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerja sama, akuntabilitas, sustainabilitas dan inisiatif sekolah dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia, serta meningkatkan warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Di samping itu MBS juga dapat meningkatkan tanggung jawab sekolah terhadap orangtua siswa, masyarakat, dan pemerintah tentang penjaminan mutu pendidikannya.

Satuan pendidikan yang menerapkan MBS, harus dimulai dengan membuat Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dalam bentuk rencana strategis (renstra) dan rencana operasional (renop) tahunan. Rencana pengembangan sekolah tentu mencakup visi, misi, tujuan sekolah, identifikasi fungsi-fungsi, analisis SWOT, langkah-langkah pemecahan masalah, penyusunan rencana dan program kerja sekolah, jadwal kegiatan, dan rencana pembiayaan.

Deperetemen Pendidikan Nasional sejak tahun 2000 melalui Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, Dinas Pendidikan Provinsi NAD, Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, maupun Lembaga Penjaminan Mutu (LPMP) Nanggroe Aceh Darussalam telah melaksanakan sosialisasi, Diklat, dan workshop MBS. Salah satu materi pokok yang dibahas menyangkut rencana pengembangan sekolah. Di samping itu bagi sekolah yang menerapkan MBS mendapat dukungan dana blockgrant.

Hadirin yang saya hormati.

Sehubungan dengan uraian di atas penulis memfokuskan kajian ini pada empat hal pokok yaitu:

1. Bagaimanakah tingkat pemahaman warga sekolah dan warga masyarakat tentang rencana pengembangan sekolah/satuan pendidikan?
2. Bagaimanakah mekanisme penyusunan rencana pengembangan sekolah/satuan pendidikan.
3. Bagaimanakah pemberdayaan rencana pengembangan sekolah?, dan
4. Bagaimanakah pengembangan/penyusunan rencana pengembangan sekolah dalam upaya penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan khususnya pada SMP Negeri di Kota Banda Aceh.

Berarti Lokus penelitian ini adalah pada SMP Negeri se-Kota Banda Aceh tahun 2008.

Penelitian tentang Rencana Penerapan Pengembangan sekolah/satuan pendidikan dalam upaya penjaminan mutu pendidikan pada SMP Negeri di Kota Banda Aceh sebagaimana dijabarkan di atas dilakukan berdasarkan data tentang penyusunan rencana pengembangan sekolah di SMP Negeri tahun 2008 di Kota Banda Aceh.

Data kajian meliputi data primer tentang tingkat pemahaman warga sekolah dan warga masyarakat diperoleh melalui tes tertulis yang berbentuk pilihan ganda.

Kajian permasalahan kedua dan ketiga tentang mekanisme penyusunan dan penerapan rencana pengembangan sekolah digunakan data primer yang diperoleh melalui koesioner yang berbentuk skala likert.

Sedangkan permasalahan keempat menyangkut pengembangan atau penyusunan rencana pengembangan sekolah digunakan

data primer yang diperoleh melalui ceklis dokumen rencana pengembangan sekolah.

Hadirin yang berbahagia.

Manajemen Berbasis Sekolah pada dasarnya dimulai dengan desentralisasi yang pada gilirannya dilanjutkan dengan pelimpahan kewenangan dari pusat kepada satuan pendidikan yang mencakup berbagai bentuk kewenangan atau kekuasaan dari yang sebagian kecil dan terbatas sampai pada yang hampir semuanya, seperti yang dikemukakan oleh Donsell (1996) sbb:

School Based Management describes a collection of practice in which more people at the school level make decision for the school. It often begins with decentralization: a delegation of certain power from central office to the school, that may include any range of power a few, limited areas to nearly everything.

Sesuai dengan paradigma di atas Depdiknas (2001) menyebutkan bahwa manajemen berbasis sekolah merupakan suatu model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah, seperti: guru, siswa, kepala sekolah, tenaga kependidikan, orang tua murid, dan masyarakat dalam upaya penjaminan mutu pendidikan yang dilandasi oleh kebijakan pendidikan nasional.

Menurut Consumer Guide (1993:43) Manajemen berbasis sekolah merupakan sebuah strategi untuk penjaminan mutu pendidikan melalui pelimpahan kewenangan dalam membuat keputusan dari pemerintah pusat kepada pihak sekolah. Manajemen berbasis sekolah memungkinkan kepada sekolah, guru, siswa, dan orang tua untuk dapat juga dijadikan sebagai pengendalian mutu (quality control) terhadap pembelajaran lebih optimal dalam upaya penjaminan mutu, karena mereka diberikan tanggung jawab membuat keputusan tentang anggaran, ketenagaan, kurikulum, melalui pelibatan pihak terkait untuk membuat keputusan-keputusan strategis, diharapkan dapat menciptakan iklim belajar siswa yang lebih efektif dan kondusif.

Slamet Ph. (2000:21) mengemukakan dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah (otonomi daerah) dan bukti-bukti empirik, menunjukkan kurang efektif dan efisien manajemen berbasis pusat, maka Departemen Pendidikan Nasional melakukan perubahan pendekatan manajemen, yaitu dari pendekatan manajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis sekolah.

Bukti-bukti empirik lemahnya pola lama manajemen pendidikan nasional dan dengan digulirkan otonomi daerah, telah mendorong dilakukannya penyesuaian diri dari pola lama manajemen menuju pola baru pendidikan masa depan yang lebih bernuansa otonomi daerah dan lebih demokratis.

Pada pola lama tugas dan fungsi sekolah hanya pada melaksanakan program daripada mengambil inisiatif merumuskan dan melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan yang dibuat sendiri oleh sekolah.

Sedangkan pola baru, satuan pendidikan memiliki wewenang lebih besar dalam pengelolaan lembaganya. Pendekatan profesional lebih diutamakan daripada pendekatan birokrasi, pengelolaan sekolah lebih desentralistik, motivasi diri lebih besar daripada diatur di luar sekolah, regulasi pendidikan lebih sederhana, peranan pusat bergeser dari mengontrol menjadi mempengaruhi, dari mengarahkan menjadi memfasilitasi, dan dari menghindari resiko menjadi mengolah resiko

Penggunaan dana lebih efisien disebabkan sisa anggaran tahun ini dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan tahun mendatang. (*efficiency Based Budgeting*), lebih mengutamakan tim work, informasi terbagi kepada semua warga sekolah, lebih mengutamakan pemberdayaan, dan struktur organisasi lebih datar sehingga lebih efisien.

Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan atau kemandirian yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri, dan "merdeka" atau independen. Istilah otonomi juga sama dengan istilah "Swa", misalnya swasembada, swadana, swakarya, untuk mengatur dan mengurus semua kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan pendidikan nasional yang berlaku. Kemandirian yang dimaksud harus didukung oleh sejumlah kemampuan, yaitu kemampuan mengambil keputusan yang terbaik secara demokratis, menghargai perbedaan pendapat, kemampuan menstabilisasi sumber daya, kemampuan memilih, cara pelaksanaan yang terbaik, kemampuan memecahkan persoalan-persoalan sekolah, kemampuan memenuhi kebutuhan sendiri.

Pengambilan keputusan partisipatif merupakan suatu cara pengambilan keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis, dimana warga sekolah didorong untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, maka yang bersangkutan akan bertanggung jawab dan berdedikasi tinggi untuk mencapai tujuan sekolah.

Dengan pengertian di atas, maka sekolah memiliki kewenangan yang lebih dalam mengelola sekolah (menetapkan target sasaran penjaminan mutu, menyusun rencana penjaminan mutu, melaksanakan rencana penjaminan mutu, dan mengevaluasi penjaminan mutu) dan partisipasi kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan sekolah merupakan ciri-ciri manajemen berbasis sekolah.

Jadi, satuan pendidikan merupakan unit utama pengelola pembelajaran, sedangkan unit-unit di atasnya (dinas pendidikan kota atau dinas pendidikan provinsi) merupakan unit pendukung pelayanan sekolah dalam upaya penjaminan mutu.

Sekolah yang mandiri memiliki beberapa ciri yaitu tingkatan kemandiriannya tinggi, bersifat adaptif dan antisipatif, memiliki jiwa kewirausahaan, bertanggung jawab terhadap kondisi kerja, komitmen yang tinggi pada dirinya dan menganggap prestasi sebagai acuan bagi penilaiannya (Depdiknas, 2001:810).

Fungsi-fungsi yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota dapat dikerjakan oleh sekolah secara professional. Aspek-aspek yang dapat digarap dalam rangka manajemen berbasis sekolah meliputi:

1) Perencanaan dan Evaluasi.

Sekolah diberikan kewenangan melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan penjaminan mutu pendidikan. Oleh karena itu sekolah perlu melakukan analisis kebutuhan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhannya sekolah membuat rencana penjaminan mutu pendidikan. Sekolah diberikan wewenang evaluasi khususnya yang dilakukan secara internal. Evaluasi internal dilakukan oleh warga sekolah untuk membantu proses pelaksanaan dan evaluasi hasil program-program yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini harus dilakukan secara jujur dan terbuka agar benar-benar dapat mengungkapkan informasi yang valid.

2) Pengelolaan Kurikulum.

Kurikulum yang dibuat oleh pemerintah pusat merupakan kurikulum standar minimal yang berlaku secara nasional.

Sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikannya. Pengembangan kurikulum yang dilakukan sekolah tidak boleh mengurangi standar kurikulum yang berlaku secara nasional. Selain itu sekolah diberikan kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal.

3) Pengelolaan Proses Pembelajaran

Pembelajaran merupakan kegiatan utama di sekolah. Sekolah diberikan kebebasan memilih strategi, metode, dan teknik-teknik pembelajaran yang paling efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, siswa, guru, dan kondisi nyata sumber daya yang tersedia. di sekolah secara umum strategi, metode, dan teknik pembelajaran harus berpusat /berorientasi pada siswa (*student centered*).

4) Pengelolaan Ketenagaan

Pelaksanaan pengelolaan ketenagaan dimulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan, hadiah, dan sanksi, hubungan kerja sampai evaluasi tenaga kerja sekolah, kecuali yang menyangkut rekrutmen guru PNS yang sampai saat ini masih ditangani oleh birokrasi di atasnya.

5) Pengelolaan Fasilitas

Pengelolaan fasilitas sudah seharusnya dilakukan sekolah mulai dari pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan hingga pengembangan. Hal ini disadari bahwa sekolah yang paling mengetahui fasilitas baik kecukupan, kesesuaian maupun kemutakhirannya, terutama fasilitas yang sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran secara langsung.

6) Pengelolaan Keuangan

Sudah sepantasnya pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh sekolah. Hal ini disadari bahwa sekolahlah yang paling mengetahui dan memahami kebutuhannya sehingga desentralisasi pengelolaan keuangan sudah seharusnya dilimpahkan ke sekolah. Sekolah juga harus diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan finansial sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tertanggung pada pemerintah.

7) Pelayanan Siswa

Pelayanan mulai penerimaan siswa baru, pengembangan atau pembinaan, penempatan untuk melanjutkan sekolah atau untuk memasuki dunia kerja hingga sampai pada alumni sebenarnya sejak dahulu sudah harus didesentralisasikan karena itu yang diperlukan adalah peningkatan intensitas dan eksistensinya.

8) Hubungan Sekolah-Masyarakat

Esensi hubungan sekolah-masyarakat adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan yang didukung masyarakat. Sebenarnya hubungan sekolah-masyarakat sejak dahulu sudah didesentralisasikan. Oleh karena itu sekali lagi yang dibutuhkan adalah peningkatan intensitas dan ekstensitas hubungan sekolah -masyarakat

9) Peningkatan Iklim Sekolah

Iklim sekolah (fisik dan non fisik) yang kondusif merupakan prasyarat bagi terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif. Lingkungan sekolah yang aman, tertib, optimis, merupakan harapan yang tinggi dari warga sekolah. Kesehatan sekolah dan kegiatan siswa adalah contoh-contoh iklim sekolah yang dapat menumbuhkan semangat belajar. Sehubungan dengan desentralisasi fungsi fungsi

di atas, maka manajemen berbasis sekolah bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan akuntabilitas sekolah melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk mengambil keputusan partisipatif sehingga diharapkan dapat meningkatkan penjaminan mutu pendidikan. Secara rinci tujuan ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya alam yang tersedia.
2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan warga masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama.
3. Meningkatkan tanggung jawab sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang penjaminan mutu pendidikan di sekolah.
4. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah dalam upaya penjaminan mutu pendidikan yang akan dicapai (Depdiknas, 2001:424)

Dengan demikian manajemen berbasis sekolah mendorong profesionalisme guru dan kepala sekolah sebagai pengelola pendidikan di sekolah. melalui penyusunan kurikulum yang efektif, rasa tanggap sekolah terhadap kebutuhan setempat, meningkatkan dan meyakinkan bahwa layanan pendidikan memenuhi tuntutan siswa dan warga sekolah. Prestasi siswa dapat dimaksimalkan melalui peningkatan partisipasi orang tua misalnya orang tua dapat membantu langsung proses pembelajaran.

Manajemen berbasis sekolah sebagai penjaminan partisipasi staf, orangtua, siswa dan masyarakat yang lebih luas dalam perumusan keputusan-keputusan tentang pendidikan dan melalui kesempatan berpartisipasi tersebut dapat meningkatkan komitmen mereka terhadap sekolah. Selanjutnya aspek-aspek tersebut pada akhirnya akan mendukung efektifitas dalam mencapai tujuan sekolah dan kontrol masyarakat serta monitoring pemerintah. Pengelola sekolah menjadi lebih bertanggung jawab, transparan, demokratis, dan menghapus monopoli dalam pendidikan.

Hadirin yang saya hormati

Di samping itu saya juga menguraikan apa yang dimaksud dengan rencana pengembangan sekolah dan bagaimana menyusun rencana pengembangan sekolah (Depdiknas, 2005). Rencana pengembangan sekolah merupakan rencana yang komprehensif untuk mengoptimalkan pemanfaatan segala sumber daya yang ada dan yang mungkin diperoleh guna mencapai tujuan yang diinginkan untuk masa mendatang. Rencana pengembangan sekolah harus berorientasi ke depan dan secara jelas bagaimana menjembatani antara kondisi saat ini dan harapan yang ingin dicapai di masa mendatang. Rencana pengembangan sekolah merupakan rencana yang secara komprehensif memperhatikan peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, memperhatikan kekuatan dan kelemahan secara internal dan kemudian mencari serta menemukan strategi dan program-program untuk memanfaatkan peluang dan kelemahan yang dimiliki, mengatasi tantangan dan kelemahan yang dihadapi guna mencapai visi yang diinginkan. Dengan demikian dalam rencana pengembangan sekolah harus tergambar secara jelas:

1. Visi sekolah yang menunjukkan gambaran sekolah yang diidamkan
2. Misi sekolah merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi sekolah yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Tujuan pengembangan sekolah yang merupakan apa yang ingin dicapai dalam upaya pengembangan sekolah dalam kurun waktu jangka menengah misalnya untuk 4 tahun.
4. Tantangan nyata yaitu kesenjangan (gap) dari tujuan yang diinginkan dan kondisi sekolah saat ini. Dengan demikian tantangan nyata itulah yang harus diatasi oleh sekolah.
5. Sasaran pengembangan sekolah yaitu apa yang diinginkan sekolah untuk jangka pendek, misalnya untuk 1 tahun.
6. Identifikasi fungsi-fungsi yang berperan penting dalam pencapaian sasaran tersebut.
7. Analisis SWOT terhadap fungsi-fungsi tersebut sehingga ditemukan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threat) dari setiap fungsi yang telah diidentifikasi sebelumnya.
8. Identifikasi alternatif langkah-langkah untuk mengatasi kelemahan dan ancaman dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki sekolah, rencana dan program sekolah dari alternatif yang terpilih guna mencapai sasaran yang ditetapkan.

Dari penjabaran di atas tampak bahwa rencana pengembangan sekolah akan memandu semua warga sekolah dalam upaya penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan serta sebagai arah pengembangan sekolah dan langkah apa yang harus ditempuh untuk melaksanakannya. Dalam menyusun rencana pengembangan sekolah/satuan pendidikan harus melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders), misalnya guru, siswa, tenaga kependidikan, orang tua siswa, komite, dan masyarakat yang memiliki perhatian terhadap sekolah. Dengan cara tersebut diharapkan rencana pengembangan sekolah menjadi milik semua warga sekolah dan pihak terkait. Pelibatan tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing artinya setiap pihak dilibatkan sesuai dengan kemampuan dan kepentingannya. Yang penting diingat adalah rasa terwakili dalam proses penyusunan rencana, sehingga ikut memiliki terhadap rencana tersebut pada akhirnya merasa bertanggung jawab moral untuk melaksanakannya. Rencana pengembangan sekolah sebenarnya secara komprehensif mencakup harapan jangka panjang yang ditunjukkan oleh visi sekolah, harapan, dan tujuan sekolah serta sasaran jangka menengah yang ditunjukkan oleh tujuan sekolah dan sasaran jangka pendek sekaligus bagaimana mencapai sasaran tersebut jika tahapan tersebut dilaksanakan secara konsisten, maka ketercapaian sasaran demi sasaran akan berakumulasi menjadi ketercapaian tujuan dan akhirnya mencapai visi sekolah.

Perlu dicatat, bahwa rencana dan program tahunan sekolah yang telah disusun, berikutnya diikuti dengan rencana anggaran sekolah yang pada umumnya disebut dengan RAPBS.

Jadi, RAPBS merupakan dukungan anggaran untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Tahapan rencana pengembangan sekolah yang disebutkan terdahulu harus dilakukan secara simultan yang memerlukan pentahapan sebagai dasar penyusunannya. Sebagai contoh, misi sekolah baru dapat disusun setelah visi ditetapkan. Sasaran baru dapat ditetapkan setelah tujuan sekolah di sepakati, dengan kondisi sekolah saat ini sehingga ditemukan tantangan nyata sekolah. Rencana dan program baru dapat disusun setelah dilakukan identifikasi alternatif, pemecahan masalah, dan dipilih alternatif yang terbaik. RAPBS baru dapat dibuat setelah rencana dan program disusun.

Hadirin yang saya hormati

langkah-langkah penyusunan rencana pengembangan sekolah adalah:

1. MERUMUSKAN VISI SEKOLAH

Visi sekolah merupakan imajinasi moral yang menggambarkan profil sekolah yang diinginkan di masa mendatang.

Imajinasi ke depan seperti itu akan selalu diwarnai oleh peluang dan tantangan yang diyakini akan terjadi dimasa yang akan datang.

Setiap orang tanpa disadari secara jelas sebenarnya juga memiliki visi. Seorang pemuda mungkin mencita-citakan, bagaimanakah keluarga yang diinginkan. Mungkin membayangkan perlu memiki istri yang sabar dan setia dan anak-anak yang saleh, cerdas, dan berbakti kepada orang tua, pekerjaan tetap, berprestise penghasilan yang cukup, rumah yang nyaman dengan tetangga yang familier dst.

Berdasarkan analog tersebut mungkin kita mengimajinasikan sekolah yang bermutu, diminati masyarakat, memiliki guru yang memadai dengan kualitas baik, fasilitas sekolah yang cukup dsb. Itulah yang disebut sebagian kriteria visi sekolah. Dalam menentukan visi tersebut sekolah harus memperhatikan perkembangan dan tantangan masa depan.

Beberapa contoh perkembangan yang perlu diperhatikan antara lain:

- 1) Perkembangan Iptek yang begitu cepat berpengaruh pada semua aspek kehidupan termasuk teknologi pendidikan.
- 2) Era global sebagai penyebab lalu lintas tenaga kerja sangat mudah sehingga akan banyak tenaga kerja asing di Indonesia atau sebaliknya banyak tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
- 3) Era informasi yang menyebabkan siswa dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber sehingga guru dan sekolah bukanlah satu-satunya sumber informasi.
- 4) Era global tampaknya juga berpengaruh terhadap perilaku dan moral manusia, sehingga sekolah diharapkan menanamkan akhlak (moralitas) kepada siswa.
- 5) Kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan yang baik untuk anak-anaknya, ternyata paralel dengan persaingan antara sekolah untuk merekrut anak yang pandai
- 6) Orang tua yang penuh perhatian terhadap pendidikan sehingga sekolah yang bermutu rendah akan ditinggalkan masyarakat.
- 7) Di era AFTA yang saat ini berlangsung, bahasa I sangat diperlukan untuk berkomunikasi dalam dunia kerja.
- 8) Di era AFTA juga telah terjadi pendirian sekolah luar negeri di Indonesia seperti Bilingual School di NAD (sekolah Turki)
- 9) Masyarakat semakin paham bahwa pendidikan bukan hanya untuk pengetahuan/ kognetif belaka, sehingga prinsip multipel integery menjadi salah satu harapan dsb.

Hadirin yang berbahagia.

Tantangan tersebut perlu direspon oleh sekolah sehingga visi sekolah akan mampu mengakomodasikan sekaligus memanfaatkan dengan peluang yang terkandung pada perkembangan tersebut, dengan kata lain kondisi sekolah yang ingin dicapai di masa mendatang sudah sesuai dengan arah perkembangan tersebut. Namun demikian visi sekolah harus tetap berada dalam koridor kebijakan pendidikan nasional. Artinya visi sekolah harus mengacu kepada kebijakan umum pendidikan yang telah ditetapkan secara nasional.

Hal itu penting dipahami untuk menghindari terjadinya kekeliruan bahwa sekolah bebas menentukan visinya yang tidak terkait dengan kebijakan pihak lainnya.

Bukankah sekolah merupakan lembaga penyelenggaraan pendidikan yang pendidikan itu diatur dalam suatu sistem pendidikan nasional.

Tentu, sekolah harus berada dalam koridor sistem pendidikan nasional tersebut. Di samping itu visi sekolah juga harus mempertimbangkan kondisi yang dimiliki sekolah dan harapan masyarakat di sekitar sekolah. Artinya jenis dan mutu pelayanan pendidikan apa yang diharapkan oleh orangtua dan masyarakat di sekitar sekolah, harus mempertimbangkan potensi yang dimiliki. Hal ini penting agar visi sekolah tidak hanya merupakan mimpi belaka.

Visi dirumuskan haruslah ideal tetapi juga harus realistis sehingga dapat dicapai dengan upaya yang sungguh-sungguh. Visi juga harus sesuai dengan harapan stakeholders yang dilayani sekolah. Bukankah visi itu untuk sekolah? Jadi siswa itulah yang pada hakekatnya akan menikmati keterwujudan visi karena memang sekolah pada dasarnya membantu siswa untuk mengembangkan diri. Dengan demikian visi sekolah haruslah berada dalam koridor pendidikan nasional memenuhi tantangan masa depan dan harapan masyarakat serta realistis karena mempertimbangkan potensi yang dimiliki. Sekolah adalah milik publik. Banyak pihak yang terkait dengan sekolah yang biasanya disebut sebagai stakeholders (kelompok pemangku kepentingan) seperti guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua, pemerintah bahkan masyarakat adalah contoh dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan sekolah. Oleh karena itu dalam merumuskan visi sekolah, kelompok berkepentingan itu harus diajak bermusyawarah dan didengar pendapatnya. Dengan cara ini visi sekolah telah mewakili aspirasi stakeholders dan mereka merasa memiliki visi tersebut yang pada gilirannya diharapkan terdorong untuk bersama-sama berperan aktif untuk mewujudkannya.

Visi pada umumnya dirumuskan dengan kalimat filosofis bahkan mirip sebuah selogan. Sering pula dirumuskan dalam bentuk kalimat yang khas mudah diingat dan terkait dengan istilah tertentu, misalnya: sebuah sekolah yang berlokasi di perkotaan merumuskan visinya: "Unggul dalam Prestasi Berdasarkan Iman dan Takwa", sekolah lain yang berlokasi di pedesaan merumuskan visinya: "Beriman, Terdidik, dan Berbudaya"

Kedua visi tersebut berbeda, namun keduanya benar. Keduanya cukup singkat dan mampu memberikan gambaran karakteristik sekolah yang diinginkan di masa mendatang.

Keduanya juga tidak menyimpang dari koridor pendidikan nasional, karena pendidikan yang unggul berdasarkan pada iman, takwa, dan berbudaya memang merupakan prinsip-prinsip pendidikan nasional. Yang mungkin masih perlu dilacak pada kedua visi tersebut adalah apakah memang benar-benar sesuai dengan potensi sekolah serta harapan masyarakat yang dilayani.

Dari uraian kedua contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa rumusan visi yang baik seharusnya memberikan isyarat:

- a. berorientasi ke masa depan untuk jangka waktu yang lama.
- b. menunjukkan keyakinan masa depan yang jauh lebih baik sesuai dengan norma dan harapan masyarakat.
- c. Mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita yang ingin dicapai
- d. Mencerminkan dorongan yang kuat akan tumbuhnya inspirasi, semangat, dan komitmen warga.
- e. Mampu menjadi dasar dan mendorong terjadinya perubahan dan pengembangan sekolah ke arah yang lebih baik.
- f. Menjadi arah perumusan misi dan tujuan sekolah.

2. MENYUSUN MISI SEKOLAH

Misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk perumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain misi berbentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikator.

3. MERUMUSKAN TUJUAN SEKOLAH

Bertolak dari visi dan misi selanjutnya sekolah merumuskan tujuan. Jika visi dan misi terkait dengan jangka waktu yang sangat panjang, maka tujuan dikaitkan dengan jangka waktu menengah. Dengan demikian tujuan pada dasarnya merupakan tahapan atau langkah untuk mewujudkan visi sekolah yang dicanangkan.

Sebaiknya tujuan tersebut dikaitkan dengan siklus program sekolah misalnya untuk jangka 4 tahunan yaitu siklus lamanya kepemimpinan kepala sekolah di SMP. Jika itu dianggap terlalu pendek dapat dijadikan untuk 2 siklus program sekolah yang berarti 8 tahun. Jika visi merupakan gambaran sekolah masa depan secara ideal, maka tujuan yang dicapai dalam jangka waktu 4 tahun mungkin belum selengkap visi. Dengan kata lain tujuan dapat berwujud sebagian dari visi

4. MENGANALISIS TANTANGAN NYATA

Tantangan nyata merupakan gap (kesenjangan) antara tujuan yang ingin dicapai sekolah dengan kondisi sekolah saat ini. Tantangan nyata itulah yang perlu diatasi dalam kurun waktu tertentu misalnya, jika dalam 4 tahun kedepan dicanangkan tujuan untuk mencapai GSA sebesar +2, sementara saat itu baru mencapai +0,4, berarti tantangan nyata yang dihadapi sekolah adalah $(+2) - (+0,4) = 1,6$. Jika saat ini sekolah baru mencapai juara 3 pada LKIR tingkat kabupaten/kota sedang tujuan sekolah ingin mencapai juara 1, maka tantangan nyata yang dihadapi sekolah adalah 2 (dua) peringkat yaitu juara 3 menjadi juara 1. Tantangan nyata tidak selalu dirumuskan sebagai rumusan secara matematis. Misalnya sebuah sekolah mencantumkan salah satu tujuan pengembangan 8 tahun ke depan untuk menjadi juara 2 LKIR tingkat nasional, pada hal saat ini baru mencapai juara 1 tingkat kabupaten. Dalam kasus seperti ini tantangan tidak dapat dirumuskan secara matematis sederhana, karena juara 2 (dua) tingkat nasional tidak dapat dibandingkan langsung dengan juara 1 (pertama) tingkat kabupaten. Hal itu dapat dirumuskan bahwa sekolah tersebut harus mampu melewati peringkat-peringkat finalis tingkat provinsi, juara 3, juara 2, juara 1 tingkat provinsi, finalis tingkat nasional, juara 3 tingkat nasional dan baru juara 2 tingkat nasional. Dalam bahasa statistika peringkat seperti itu disebut ordinal dan bukan interval, sehingga formula matematika tidak dapat diterapkan secara langsung. Namun yang penting dapat dipahami makna peningkatan (improvement) yang harus dilalui sekolah.

5. MENENTUKAN SASARAN SEKOLAH

Rencana tahunan merupakan penjabaran dari tujuan sekolah yang telah dirumuskan berdasarkan kesenjangan/selisih/gap yang terjadi antara kondisi sekolah saat ini dengan tujuan sekolah untuk 4 sampai 8 tahun kedepan. Kesenjangan tersebut juga merupakan tantangan nyata sekolah. Jadi, tantangan nyata adalah selisih antara tujuan yang diinginkan dengan kenyataan yang ada di saat ini.

Berdasarkan pada tantangan nyata tersebut, selanjutnya di rumuskan sasaran atau target mutu yang akan dicapai oleh sekolah untuk satu tahun ke depan. Sasaran harus menggambarkan kualitas dan kuantitas yang ingin dicapai dan terukur agar mudah melakukan evaluasi keberhasilannya, meskipun sasaran dirumuskan berdasarkan tantangan nyata yang dihadapi oleh sekolah, namun perumusan masalah tersebut harus tetap mengacu pada visi, misi, dan tujuan sekolah. Untuk itu setiap sekolah harus memiliki visi, misi, dan tujuan sekolah merumuskan sasarannya. Sasaran dapat disebut juga tujuan jangka pendek atau tujuan situasional sekolah, mengingat tujuan sekolah dirumuskan berdasarkan hasil pengamatan.

6. IDENTIFIKASI FUNGSI-FUNGSI

Setelah sasaran ditentukan, selanjutnya dilakukan identifikasi fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran tsb. Langkah ini diperlukan untuk persiapan dalam melakukan analisis SWOT. Fungsi-fungsi dimaksud misalnya meningkatkan skor GSA merupakan fungsi proses pembelajaran dan pendukung pembelajaran itu sendiri seperti ketenagaan, kesiswaan, kurikulum, sarana - prasarana, serta hubungan sekolah dengan masyarakat. Di samping itu terdapat pula fungsi-fungsi terkait langsung dengan proses pembelajaran di antaranya pengembangan iklim kondusif di sekolah, dan pengelolaan keuangan.

Apa bila sekolah keliru dalam menetapkan fungsi-fungsi tersebut atau fungsi tidak sesuai dengan sasarannya maka dapat diduga hasil analisis akan menyimpang dan tidak bermanfaat untuk pemecahan masalah. Untuk itu sangat diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam menentukan fungsi yang diperlukan guna mencapai sasarannya. Fungsi-fungsi tersebut dapat dibedakan, fungsi pokok yang berbentuk proses seperti pembelajaran, pelatihan, pertandingan dsb., serta fungsi pendukung, berbentuk input seperti ketenagaan, sarana-prasarana, anggaran dsb. Setiap fungsi perlu ditentukan pula faktor-faktornya baik faktor internal maupun faktor eksternal, agar setiap fungsi mempunyai batasan yang jelas dan memudahkan dalam menganalisis.

7. MELAKUKAN ANALISIS SWOT

Analisis SWOT dilakukan dengan maksud untuk mengenali tingkat kesiapan setiap fungsi dari keseluruhan fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena tingkat kesiapan fungsi ditentukan oleh masing-masing faktor yang terlibat pada fungsi tersebut baik menyangkut faktor internal maupun faktor eksternal.

Dalam melaksanakan analisis terhadap fungsi dan faktor-faktornya berlaku ketentuan sbb:

Kesiapan yang memadai, artinya minimal memenuhi kriteria kesiapan yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang dinyatakan sebagai kekuatan bagi faktor internal dan peluang bagi faktor eksternal. Sedangkan tingkat kesiapan yang kurang memadai, yang tidak memenuhi kriteria kesiapan minimal dinyatakan sebagai kelemahan bagi faktor internal dan merupakan ancaman bagi faktor eksternal.

Untuk menentukan kriteria kesiapan memerlukan kecermatan, kehati-hatian, dan pengalaman yang memadai agar dapat diperoleh ukuran kesiapan yang tepat. Setelah diketahui tingkat kesiapan faktor melalui analisis SWOT, langkah selanjutnya, memilih alternatif langkah-langkah pemecahan permasalahan yaitu tindakan yang diperlukan untuk mengubah fungsi yang tidak cukup menjadi fungsi siap dan mengoptimalkan fungsi yang dinyatakan siap. Berdasarkan pada fungsi-fungsi yang telah diidentifikasi, maka perlu ditemukan faktor apakah, baik faktor internal maupun faktor eksternal dalam fungsi tersebut dan kemudian dimasukkan dalam tabel analisis SWOT. Oleh karena itu sekolah memiliki lebih dari satu sasaran, maka setiap sasaran yang telah ditentukan harus di analisis dengan analisis SWOT.

8. MENGIDENTIFIKASI ALTERNATIF LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN MASALAH.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan untuk sasaran pertama, maka dapat diidentifikasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi oleh sekolah pada fungsi yang diberikan. Untuk mengatasi kelemahan atau ancaman tersebut sekolah mencari alternatif langkah-langkah pemecahan masalah, pada dasarnya merupakan cara mengatasi fungsi yang memenuhi kesiapan. Untuk memecahkan permasalahan yang sama, masing-masing sekolah dapat menentukan alternatif pemecahan persalahan yang berbeda suatu potensi yang dimiliki sekolah dan memilih alternatif yang paling tepat serta efisien bagi sekolah. Sekolah yang sukses adalah sekolah yang mampu melaksanakan alternatif pemecahan masalah dengan inovasi maksimal dengan biaya minimal.

9. MENYUSUN PROGRAM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Kepala sekolah bersama dengan komite sekolah menyusun dan merealisasikan rencana program-programnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Rencana yang dibuat harus menjelaskan secara detail dan lugas, tentang penjaminan mutu yang ingin dicapai. Kegiatan yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, kapan dan dimana dilaksanakan dan biaya yang diperlukan. Hal tersebut juga diperlukan untuk memudahkan sekolah dalam menjelaskan dan mendapat dukungan dari pemerintah maupun orangtua peserta didik baik secara moral maupun fungsional untuk pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.

10. MENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH.

Anggaran merupakan rencana yang diformulasikan dalam bentuk nilai rupiah untuk jangka waktu tertentu (periode) serta alokasi sumber-sumber kepada setiap aktifitas. Anggaran memiliki peranan penting untuk perencanaan, penjaminan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan di sekolah. Untuk itu setiap penanggung jawab program harus menjalankan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Langkah-Langkah Penyusunan Anggaran

- 1) inventarisasi rencana yang akan dilaksanakan
- 2) menyusun rencana yang akan dilaksanakan.
- 3) menentukan program kerja dan rincian program
- 4) menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program
- 5) menghitung dana yang dibutuhkan

11. MENENTUKAN SUMBER DANA UNTUK MEMBIAYA RENCANA.

Berbagai rencana yang dituangkan dalam program tahunan pada dasarnya adalah program sekolah. Untuk hal tersebut anggaran yang diperlukan juga tercakup dalam RAPBS. Anggaran untuk rencana program dalam MBS dapat berasal dari berbagai sumber dana. Dalam menyusun RAPBS harus mempertimbangkan efisiensi. anggaran setiap program sekolah. Pada anggaran yang disusun perlu dijelaskan tentang rencana program yang akan dilaksanakan merupakan kelanjutan atas kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Anggaran disusun memuat informasi/data minimal:

1. Informasi rencana kegiatan, rencana baru atau lanjutan.
2. Uraian kegiatan program: program kerja dan rincian program.

Sifat anggaran yang lain, harus luwes, artinya apabila dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan ternyata harus dilakukan penyesuaian dengan kegiatan, maka anggaran dapat direvisi dengan menempuh prosedur tertentu.

Perubahan yang mungkin terjadi antara lain:

- a) Adanya suatu kegiatan program yang sebelumnya tidak dicantumkan dalam proposal, sedangkan di lain pihak terdapat rencana kegiatan yang telah dicantumkan dalam proposal, tetapi tidak dilaksanakan karena suatu alasan.
Apabila terjadi perubahan yang demikian sekolah harus melaporkannya secara tertulis kepada komite sekolah untuk mendapat persetujuan tanpa melihat besarnya perubahan jumlah anggaran yang terjadi dan selanjutnya diinformasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- b) Perubahan yang tidak berkaitan dengan rencana kegiatan, hanya dalam komponen program atau aktivitas dan mengakibatkan perubahan bersangkutan, maka perubahan perubahan tersebut harus segera dilaporkan kepada komite pendidikan secara tertulis.
- c) Perubahan berkaitan dengan perubahan komponen program atau aktivitas, namun pergeseran atau perubahan dana yang terjadi secara kumulatif masih di bawah 10% dari total anggaran rencana kegiatan. Perubahan yang demikian tidak perlu dilaporkan segera tetapi, cukup dilaporkan kepada kepala sekolah.

Hadirin yang terhormat.

Dalam hal pengkajian masalah pertama sampai masalah keempat tentang penyusunan dan implementasi rencana pengembangan sekolah dalam penjaminan mutu pendidikan pada SMP Negeri di Kota Banda Aceh, dilakukan analisis data primer yang diperoleh dari responden yang dijangkau telah ditentukan secara sampling dengan menggunakan metode analisis data secara deskriptif. Menurut Winarno Surachmad suatu metode yang berupa penyelidikan dan menafsirkan data yang ada, tentang situasi yang dialami suatu hubungan dengan kegiatan, pandangan sikap yang tampak atau proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang tampak dan sebagainya.

Dari hasil kajian tentang pemahaman warga sekolah dan warga masyarakat tentang rencana pengembangan sekolah dapat disampaikan bahwa tingkat pemahaman tentang rencana pengembangan sekolah diperoleh dengan cara membagi skor dengan jumlah responden dikalikan 100%. Hasil yang diperoleh rata-rata tingkat pemahaman kepala sekolah sebesar 47%, tingkat pemahaman guru rata-rata 46%, tingkat pemahaman siswa rata-rata sebesar 39%, tingkat pemahaman tata usaha rata-rata 45%. Jumlah rata-rata tingkat pemahaman warga sekolah dan warga masyarakat tentang rencana pengembangan sekolah sebesar 45,20%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman warga sekolah dan warga masyarakat belum menggembirakan. Rata-rata reponden belum memahami ruh/makna yang terkandung dalam visi, misi, dan bagaimana melakukan analisis SWOT. Pengertian visi dan misi masih

disamakan dengan tujuan atau sasaran. Padahal untuk menyusun rencana pengembangan sekolah diperlukan tingkat pemahamannya yang tinggi.

Hadirin yang mulia.

Hasil kajian tentang mekanisme penyusunan rencana pengembangan sekolah dapat disampaikan bahwa kesesuaian mekanisme penyusunan rencana pengembangan sekolah diperoleh dengan jumlah responden dikalikan 100%. Hasil yang diperoleh rata-rata kesesuaian mekanisme penyusunan rencana pengembangan sekolah oleh kepala sekolah sebesar 82% tingkat kesesuaian mekanisme rencana penyusunan rencana pengembangan sekolah oleh guru sebesar 82%. Tingkat kesesuaian mekanisme oleh siswa sebesar 80%. Tingkat kesesuaian mekanisme penyusunan rencana pengembangan sekolah oleh komite sekolah sebesar 83%. Sehingga bila dijumlah rata-rata tingkat kesesuaian mekanisme penyusunan rencana pengembangan sekolah diperoleh angka sebesar 82%. Hal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyusunan rencana pengembangan sekolah sudah sangat baik.

Rata-rata responden menyatakan sudah dilibatkan dalam menyusun rencana pengembangan sekolah. Dengan dilibatkannya warga sekolah dan warga masyarakat akan muncul rasa memiliki yang pada hakikatnya semua warga sekolah dan warga masyarakat akan bertanggung jawab serta melaksanakan pengembangan sekolah yang telah disusun bersama.

Hadirin yang terhormat.

Hasil kajian tentang pemberdayaan rencana pengembangan sekolah dapat disampaikan bahwa pemberdayaan rencana pengembangan sekolah diperoleh dengan cara membagi jumlah skor yang diperoleh dengan jumlah responden dikalikan 100%. Hasil yang diperoleh tingkat pemberdayaan rencana pengembangan sekolah oleh kepala sekolah sebesar 85%. Tingkat pemberdayaan rencana pengembangan sekolah oleh guru diperoleh skor sebesar 85%. Tingkat pemberdayaan rencana pengembangan sekolah oleh siswa diperoleh skor sebesar 80%. Tingkat rencana pengembangan sekolah oleh tata usaha diperoleh skor 82%, dan tingkat pemberdayaan rencana pengembangan sekolah oleh komite sekolah diperoleh skor 84%. Sehingga berjumlah rata-rata skor tingkat pemberdayaan rencana pengembangan sekolah sebesar 83,20%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemberdayaan rencana pengembangan sekolah sudah sangat baik. Rata-rata responden menyatakan bahwa rencana pengembangan sekolah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tingkat ketercapaian program juga baik. Fakta ini sejalan dengan hasil kajian terhadap masalah kedua di atas yaitu dalam menyusun rencana pengembangan sekolah sudah melibatkan semua warga sekolah dan warga masyarakat bersama-sama untuk melaksanakan dan menyukseskan rencana yang sudah disusun.

Hasil kajian tentang pengembangan/penyusunan rencana pengembangan sekolah dapat disampaikan bahwa pengembangan/penyusunan rencana pengembangan sekolah ini diperoleh dengan cara meneliti dokumen rencana pengembangan sekolah yang terdiri dari delapan komponen yang telah dibuat sekolah dan mencocokkan dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku. Skor diperoleh secara rata-rata dengan cara membagi jumlah skor yang diperoleh dengan jumlah responden dikalikan 100%. Hasil yang diperoleh dalam komponen 1 yang terdiri dari rumusan visi, misi, dan tujuan diperoleh rata-rata skor sebesar 14,77%. Komponen ke dua yaitu merumuskan tantangan nyata diperoleh rata-rata skor 9,33%. Komponen ketiga yaitu menentukan sasaran sekolah diperoleh rata-rata skor 7%. Komponen ke empat yaitu melaksanakan analisis SWOT diperoleh rata-rata skor sebesar 17,75%. Komponen ke lima yaitu menentukan langkah-langkah pemecahan masalah diperoleh skor rata-rata sebesar 13,33%. Komponen ke enam yaitu menyusun rencana dan program penjaminan mutu diperoleh skor rata-rata sebesar 13,66%, dan komponen ke delapan tentang kelengkapan persetujuan diperoleh skor rata-rata sebesar 14%. Bila mencari rata-rata skor pengembangan atau penyusunan rencana pengembangan sekolah diperoleh sebesar 14,71%. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen pengembangan atau penyusunan rencana pengembangan sekolah dinilai sangat kurang. Dalam menyusun visi rata-rata sekolah masih seragam (sama) belum berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal sekolah. Pada hal kita mengetahui antara satu sekolah dengan sekolah lain kondisinya baik input, proses, maupun output nya tidaklah sama, sehingga agak sulit bagi sekolah tersebut dalam mencapai apa yang direncanakan dalam rencana pengembangan sekolah. Rumusan visi yang kurang tepat dengan kondisi sekolah ini juga mempengaruhi rumusan visi yang merupakan upaya dan tindakan yang dilakukan sekolah untuk mencapai visi.

Tindakan yang dilakukan sekolah tidak sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah. Begitu juga rumusan tujuan sekolah akan berbeda dengan potensi peserta didik. Pada dasarnya sekolah dalam mengembangkan tujuannya harus berdasarkan potensi, minat, bakat, yang sesuai dengan tingkat kecerdasan peserta didik.

Dalam menganalisis tantangan nyata rata-rata sekolah belum berdasarkan kondisi riil sekolah saat ini. Target yang dicanangkan terlalu tinggi, sehingga selisih antara keadaan saat ini dengan keadaan yang diinginkan tidak rasional. Pada umumnya dalam menganalisis tantangan nyata menggunakan rumus tanpa mempertimbangkan kemungkinan fakta bahwa tidak setiap tahun ada pertandingan atau even olah raga. Menentukan sasaran sekolah juga sangat memperhatikan, rumusan sasaran sekolah belum terukur dan kapan pencapaiannya juga belum jelas, sehingga untuk melakukan monitoring dan mengevaluasi dalam melaksanakan program ada hambatan atau sasaran sudah tercapai atau belum tercapai sangat sulit diketahui oleh sekolah. Sesungguhnya hasil monitoring dan evaluasi dapat dijadikan dasar bagi sekolah untuk menyusun dan memperbaiki rencana tahun berikutnya.

Analisis SWOT dilakukan untuk mengetahui tingkat kesiapan setiap faktor. Faktor yang tidak siap akan dicari pemecahan masalahnya. Ketelitian dan kecermatan dalam menganalisis setiap faktor akan menentukan keberhasilan menyusun program penjaminan mutu di sekolah tersebut. Apa yang dilakukan sekolah untuk melakukan analisis SWOT tidak seperti yang diharapkan. Analisis SWOT dilakukan sekedar untuk memenuhi kelengkapan sistematika penyusunan rencana pengembangan sekolah. Dalam merinci faktor internal dan faktor eksternal serta tingkat kesiapan setiap faktor yang sudah memadai dan mana faktor yang belum memadai kondisi ideal dan tingkat kesiapan menggunakan ukuran verbal. Pada umumnya sekolah belum menyadari pentingnya analisis SWOT untuk satuan pendidikannya. Hasil analisis SWOT ini berimbas terhadap komponen menentukan langkah-langkah pemecahan masalah dan menentukan penjaminan mutu pendidikan. Bila hasil analisis SWOT tidak tepat, akan berdampak terhadap pemecahan masalah dalam program penjaminan mutu yang tidak sesuai dengan kondisi sekolah.

Hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan hasil analisis tersebut terdapat dua hal yang masih memprihatinkan yaitu pemahaman warga sekolah dan warga masyarakat terhadap rencana pengembangan sekolah dan penyusunan atau pengembangan rencana sekolah. Kedua hal tersebut sangat berkaitan. Rencana pengembangan sekolah baru dapat disusun dengan tepat dengan kondisi sekolah apa bila warga

sekolah dan warga masyarakat mempunyai pemahaman dengan baik tentang rencana pengembangan sekolah. Meskipun sekolah telah menyusun RPS-nya secara bersama dan sekolah juga telah melaksanakan RPS sesuai rencana, tetapi karena tingkat pemahaman tentang rencana pengembangan sekolah masih rendah dan berimbas pada dokumen rencana pengembangan sekolah tersebut belum dapat mewujudkan penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan tersebut.

Sehubungan dengan otonomisasi sekolah untuk mengatur satuan pendidikannya sesuai dengan kondisinya masing-masing, hendaknya kepala sekolah menjadi menejer dapat berkoordinasi dengan tim manajemen berbasis sekolah baik yang berada di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, sehingga diharapkan penyusunan RPS benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian penjaminan mutu (quality Assurance) pendidikan dapat terwujud di satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan (quality improvement).

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) sebagai unit pelaksana teknis pusat Depdiknas di daerah mempunyai tugas pokok antara lain memfasilitasi satuan pendidikan, perlu memikirkan strategi yang tepat dalam pendampingan sekolah, sehingga salah satu upaya pemerintah untuk penjaminan mutu pendidikan dapat terwujud. Dengan demikian tugas pokok dan fungsi LPMP sebagai pengawal standar pendidikan nasional dalam upaya penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan di provinsi masing-masing dapat menjadi kebutuhan masyarakat.

Hadirin yang terhormat.

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis dapat merumuskan simpulan sbb:

1. Tingkat pemahaman warga sekolah dan warga masyarakat tentang RPS pada SMP Negeri di Kota Banda Aceh dinilai cukup memadai
2. Mekanisme penyusunan RPS warga sekolah dan warga masyarakat pada SMP Negeri Kota Banda Aceh sangat baik.
3. Tingkat pemberdayaan RPS pada SMP Negeri Kota Banda Aceh amat baik
4. Pengembangan RPS pada SMP Negeri di Kota Banda Aceh masih rendah. Dengan demikian penerapan RPS dengan pemahaman dan pengembangan yang baik dan konsisten pada SMP Negeri di Kota Banda Aceh dapat menjadi suatu sistem penjaminan mutu pendidikan.

Hadirin yang saya muliakan,

Untuk mengakhiri orasi ilmiah ini penulis ingin menyampaikan beberapa rekomendasi:

1. Pemahaman warga sekolah dan warga masyarakat terhadap RPS di satuan pendidikannya perlu ditingkatkan.
2. Perlu diadakan workshop tentang RPS bagi warga sekolah dan warga masyarakat sebagai stakeholders untuk penerapan RPS.
3. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NAD dan Dinas Pendidikan perlu mengadakan penelitian lanjutan tentang pemahaman, mekanisme, pemberdayaan, dan pengembangan RPS guna penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan SMP khususnya di Kota Banda Aceh.

Demikianlah penyampaian sinopsis dalam forum orasi terhormat ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin yang dengan penuh perhatian dan kesabaran mengikuti kegiatan ini, mohon maaf atas kekurangannya semoga menjadi amal ibadah kita semua. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Kepala Direktorat Pembinaan Widyaiswara LAN Bakarta, Bapak Kepala LPMP NAD, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh, Kasubag, dan Kasi, serta kepada sanak keluarga saya, rakan-rakan Widyaiswara LPMP NAD, staf struktural, dan Widyaiswara BKPP, BKKBN, Kesehatan NAD yang telah berpartisipasi aktif dan telah mendukung sepenuhnya dari awal untuk menyukseskan kegiatan ini.

Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufik wal hidayah

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Diedit Oleh		Editor		
Disahkan Oleh		Redaktur		

RIWAYAT HIDUP

Widyaiswara yang mendapat pengukuhan dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara Utama hari ini bernama Drs. H. Teuku Hasanuddin Yusuf, M.Si., NIP 130686579, lahir 11 Juli 1956. putra ke tiga dari enam bersaudara yang dilahirkan oleh Ibunda Hj. Cut Andian (almarhumah) dan ayahanda Teuku Muhammad Yusuf Daud (almarhum) di Beureunuen Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, beragama Islam, status kawin yang dikaruniai 3 putra dan 2 putri dengan isteri bernama Hj Yuliaty Said.

Mulai menempuh pendidikan formal SDN Ie Leubeu (1961-1967), SMPN Bureunuen (1968-1971). SMA Beureunuen (1971-1974), PGSLP Banda Aceh (1975), FKIP Unsyiah/S1 (1981-1985), FEKON Unsyiah/S2 (1999-2001). Sebagai Pegawai Negeri Sipil beliau mulai bekerja menjadai guru SMPN Kembang Tangjung (1977-1987), Kordinator SMA Tgk Chik Di Pasi, SMP Busu, SMP Blang Malu 1 dan Blang Malu 2 (1987-1989), Guru SMAN Glp Tiga (1989-1992) Kepala SMP Islam/SMA Islam Mutiara merangkap Kordinator Pendidikan Islam Dayah Tgk Chik Di Beureu eh (TK Islam, SD Islam, SMP Islam, dan SMA Islam/ 1992-1998) dan Widyaiswara BPG/LPMP (1997-sekarang).

Di samping pengalaman tersebut di atas beliau juga sebagai pendiri dan pengelola beberapa Lembaga Pendidikan a.l: Pendidikan (Terpadu) Dayah Tgk. Chi' Di Beureueh (TK Islam, SD Islam, SMP Islam, SMA Islam) , SMEA Mutiara, (sekarang SMK 1 Mutiara), SMP Busu, SMP Blang Malu, mendirikan dan mengelola PTS Akdemi Maritim Nusantara (AMN) Malahayati Aceh (2000-2006). Sebagai tugas tambahan pernah menjadi Konsultan Manajemen Mutu BPG/LPMP, Wakil Menejemen Mutu (WMM) ISO 9001:2000 LPMP NAD (2007-sekarang). Sebagai staf pengajar di beberapa Perguruan Tinggi: Universitas Jabal Ghafur, STKIP dan STISIP Alwasliyah, APK, STIKES. AKPER Fakinah

Kepangkatannya dimulai dari CPNS (1978) Pengatur Muda II/a, Pengatur Muda Tk.I II/b, Penata Muda/IIIa, Penata Muda Tk.I/IIIb, Penata/IIIc, Penata Tk.I/IIId, Pembina/IVa, Pembina Tk.I/IVb, Pembina Utama Muda/IVc (2005). Kkususnya kepangkatan di Widyaiswara mulai dari Gol. III/d.- IV/a- IVb- IVc, dan sekarang diusulkan ke IVd , dengan Jabatan Widyaiswara Utama.

Di organisasi kemasyarakatan, pernah aktif sebagai Ketua Umum PII Kec. Mutiara, Wakil Ketua Senat Mahasiswa FKIP Unsyiah, Sekretaris Umum dan Ketua I PII Kab Pidie, Ketua I PII Prov Dista, Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Prov Dista, Sekretaris DMI NAD, Ketua Umum PW- BKPRMI Prov. NAD, Sekeretaris Umum PP DKMA Prov. NAD, Sekretaris Umum IWI NAD dan Sekreteris APTISI Wil IB Provinsi NAD, Ketua Majelis Pendidikan Alwasliah B. Aceh, Sekretaris Yayasan Pendidikan Mutiara, Sekeretris Yayasan Baitul A'la, Pendiri Yayasan Putroe Phang, Pendiri Yayasan Assidqi, Pendiri Yayasan Bhinnike Tunggal Ika.

Penghargaan yang diterimanya antara lain: Satyalancana Karya Satya 20 tahun, Citra Pendidikan ASEAN Award, Busana Nasional Award, Satyalancana Karya Satya 30 tahun.

Peghargaan lain yang diberikan Pemda NAD antara lain : Dari Dinas Kesehatan Prov NAD: Studi banding untuk Kesehatan Lingkungan Pendidikan ke Malaysia, Thailand, Singapore (1996) Dari Gubernur Prov NAD: Studi Banding Wawasan Keislaman: ke Malaysia, Yordania, Spanyol/Kardova, Turki, Palestina, Israil, Uzbekistan, Tajikistan, Mesir, dan Arab Saudi (1997). Dari Yayasan Baitul A'la: Studing banding khusus ke Pendidikan Islam di Malaysia, Thailand, Singapore.(1997) dan bersama PP DKMA; Studi banding untuk Pusat Informasi Masjid Antar Bangsa ke beberapa Negara ASEAN (2005,2006, 2007).

Karya tulisnya yang diperlombakan antara lain: Kemampuan Menulis Siswa SMP Neg Kota Banda Aceh (FIW:2007) Fasilitasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (FIW:2008) dan Temu Karya LPMP se-Sumatra di Jambi, Model Penjaminan Mutu Bagi Sekolah Terpencil (Tim temu Karya LPMP se-Sumtra 2008 di Lampung) dan Penjaminan Mutu Pendidikan Pada SMP Negeri di Kota Banda Aceh (Orasi Ilmiah: 2009)

Beberapa Artikel terakhir yang dimuat di majalah antara lain: Menulis Artikel Itu Tidak Sulit (2008), Pengembangan Potensi Diri (2008), Metode Pembelajaran Menulis di SMA (2008), Model Pembelajaran Outdoor Learning di SMP (2008)